

IMPLEMENTASI PENILAIAN AFEKTIF DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Nia Marniati

Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr Hamka, 25132

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 5 November 2018
Direvisi: 18 November 2018
Diterbitkan: 21 November 2018

KATA KUNCI

Penilaian Afektif, Pembelajaran PPKn

KORESPONDEN

No. Telepon: 0822 8317 4814
E-mail:
niamarniati635@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman. Implementasi penilaian afektif dilihat dari pelaksanaannya, kendala yang dihadapi guru dan upaya yang dilakukan sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposif (purposive sampling). Data dikumpulkan melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penilaian afektif belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian (berdasarkan Permendikbud No. 23/2016 Tentang Standar Penilaian). Hal ini dapat dilihat dari lima tahapan implementasi penilaian afektif oleh guru PPKn yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, pemanfaatan/tindak lanjut dan laporan penilaian afektif. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kendala yang dihadapi guru diantaranya : guru kurang mampu mengembangkan instrumen penilaian afektif, dan sebagainya. Adapun upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala tersebut yaitu memberikan pembinaan, mengadakan lokakarya dan workshop. Dapat disimpulkan, pelaksanaan penilaian afektif yang tidak sesuai dengan ketentuan penilaian pada suatu tahap akan mempengaruhi tahap lainnya. Penilaian yang sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian akan menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran PPKn begitu pula sebaliknya.

PENDAHULUAN

Pada Kurikulum 2013 proses penilaian pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*). Penilaian dilakukan secara utuh yang meliputi kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajarnya. Sehingga penilaian ini berdampak pada pencapaian kompetensi sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor) yang dilakukan secara proporsional (Fadlillah, 2014 : 178-179). Begitu pula halnya yang diungkapkan oleh Kunandar (2015 : 35-38) bahwa pada pendekatan penilaian otentik guru menilai proses maupun hasil belajar siswa dalam situasi yang sesungguhnya sehingga dapat menunjukkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Dengan kata lain, antara penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dilaksanakan secara seimbang. Sehingga penilaian kompetensi sikap tidak lagi terabaikan sebagaimana pada pelaksanaan kurikulum sebelumnya.

Dalam mencapai hal demikian, ada ketentuan dan standar penilaian. Hal ini diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian dan Permendikbud No. 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Ini artinya, guru harus melaksanakan penilaian afektif sesuai dengan ketentuan standar penilaian. Apalagi untuk guru mata pelajaran PPKn, yang lebih memperhatikan kompetensi afektif, karena berkaitan erat dengan pencapaian tujuan mata pelajaran PPKn.

Penilaian afektif merupakan domain yang banyak dikeluhkan dalam proses penilaian Kurikulum 2013. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Marini (2015:81), bahwa teknik penilaian yang digunakan guru belum sesuai dengan indikator dari KD atas KI yang bersangkutan karena, guru kurang memiliki kemampuan dan waktu yang cukup dalam

mempersiapkan teknik dan instrumen yang sesuai. Selain dari pada itu, hasil penelitian Ayuriyanti (2015) juga menunjukkan demikian, bahwa 58 % guru mengaku mengalami kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. 17 % guru menyatakan kendalanya terdapat pada penilaian afektif.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan penilaian afektif yang dilakukan guru PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan salah seorang guru PPKn menunjukkan bahwa guru tidak mengukur kompetensi afektif peserta didik dengan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian afektif yang dilakukan guru PPKn belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian.

Penilaian afektif yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian, akan mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan pembelajaran PPKn. Hal ini disebabkan karena hasil penilaian afektif peserta didik tidak valid, sehingga tindak lanjut penilaian yang diberikan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman, kendala yang dihadapi guru, dan upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman, kendala yang dihadapi guru, dan upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan

penelitian yang dipilih berdasarkan teknik purposif (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan, analisis dokumen, dan wawancara. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal : 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman dilihat dari lima proses/tahapan. *Pertama*, tahap perencanaan, pada tahap ini dilihat dari aspek rumusan indikator afektif, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, teknik dan instrumen yang direncanakan, serta instrumen penilaian afektif yang dilampirkan dalam dokumen RPP. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa, rumusan indikator aspek afektif, tujuan pembelajaran, dan rencana kegiatan pembelajaran telah memuat butir sikap yang dikehendaki pada indikator. Namun belum halnya untuk teknik dan instrumen yang direncanakan serta instrumen yang dilampirkan tidak terdapat kesesuaian.

Kedua, tahap pelaksanaan, pada pelaksanaan penilaian afektif dalam PBM dilihat dari aspek pemberian apresiasi dan pembinaan, penanaman nilai-nilai sikap spiritual dan sosial dalam implementasi KI-3 dan KI-4, pengisian catatan jurnal dan lembar observasi oleh guru serta pengisian lembar penilaian diri dan antar teman oleh siswa. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk pemberian apresiasi dan pembinaan serta penanaman nilai sikap sosial dalam implementasi KI-3 dan KI-4 sudah terlaksana dengan baik. Namun, belum halnya untuk pemberian apresiasi dan pembinaan sikap spiritual serta penanaman nilai sikap spiritual dalam implementasi KI-3 dan KI-4. Begitu pula dengan sikap yang ditunjukkan peserta didik

tidak dinilai atau dicatat oleh guru melalui catatan jurnal, lembar observasi, maupun lembar penilaian diri dan antar teman.

Ketiga, tahap pengolahan, pada tahap ini dilihat dari tiga proses yaitu bagaimana guru merangkum nilai afektif peserta didik selama 1 semester, lalu menyerahkan kepada wali kelas, dan wali kelas menentukan nilai akhir sikap peserta didik. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa guru PPKn tidak memiliki nilai atau catatan perilaku peserta didik selama 1 semester sehingga dalam memberikan nilai akhir peserta didik tidak memiliki pedoman nilai dengan kata lain diperkirakan/diingat-ingat sikap masing-masing peserta didik secara umum. Selanjutnya guru PPKn menyerahkan nilai tersebut kepada wali kelas melalui sistem secara online, kemudian wali kelas menentukan nilai akhir sikap berbentuk predikat dan deskripsi.

Keempat, tahap pemanfaatan dan tindak lanjut. Pada tahap ini dilihat dari apresiasi dan pembinaan yang diberikan guru terhadap sikap sosial peserta didik sudah terlaksana dengan baik. Namun belum halnya untuk pemberian apresiasi dan pembinaan pada sikap spiritual. Begitu pula halnya dengan kerjasama antara guru BK dengan guru PPKn dalam memberikan pembinaan terdapat sikap peserta didik yang memerlukan pembinaan masih kurang terjalin.

Kelima, tahap laporan, pada tahap ini dilihat dari proses guru PPKn memberikan nilai akhir sikap peserta didik, dan proses wali kelas memberikan nilai akhir sikap peserta didik untuk Laporan Hasil Belajar masing-masing peserta didik. Diketahui bahwa, sama halnya dengan guru PPKn bahwa wali kelas juga tidak memiliki catatan perilaku peserta didik selama 1 semester sehingga dalam memberikan predikat nilai dengan cara mengingat perilaku peserta didik secara umum. Sedangkan untuk deskripsi sikap yang tertera di rapor siswa dibuat oleh sistem secara otomatis berdasarkan predikat nilai yang diinput oleh guru PPKn dan wali kelas.

Pelaksanaan penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman, sebagaimana halnya demikian disebabkan karena guru mengalami beberapa kendala. Sehingga implementasi penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian. Adapun kendala tersebut yaitu : 1) guru kurang mampu mengembangkan instrumen penilaian afektif, 2) guru kurang memperhatikan penanaman nilai sikap spiritual pada implementasi KI-3 dan KI-4, 3) jumlah siswa yang banyak dan waktu yang sedikit sehingga guru tidak mengisi lembar/instrumen penilaian afektif dalam PBM, dan 4) guru kurang mampu membuat deskripsi sikap spiritual dan sosial berdasarkan predikat nilai yang diperoleh peserta didik.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang ditemukan guru dalam pelaksanaan penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn yaitu 1) memberikan pembinaan secara langsung kepada guru, 2) mengadakan lokakarya tentang perangkat pembelajaran, dan 3) mengadakan workshop tentang perangkat pembelajaran.

Berdasarkan temuan penelitian terkait dengan implementasi penilaian afektif dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman, menunjukkan bahwa guru PPKn telah merencanakan/merancang butir-butir sikap yang dinilai pada kompetensi afektif peserta didik melalui rumusan IPK, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran pada RPP (satu Kompetensi Dasar). Namun belum membuat/mengembangkan instrumen penilaian afektif pada RPP, sehingga pada tahap pelaksanaan guru tidak mengisi/menilai kompetensi afektif peserta didik menggunakan instrumen penilaian afektif yang sesuai dengan ketentuan. Begitu pula halnya dengan tahap pengolahan, dalam hal ini tidak terdapat catatan nilai sikap peserta didik selama 1 semester untuk dijadikan pedoman bagi guru dalam

menentukan nilai akhir sikap spiritual dan sosial peserta didik berupa predikat maupun deskripsi yang akan dimuat dalam laporan hasil belajar peserta didik.

Terkait dengan instrumen penilaian afektif, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa guru tidak membuat dan mengisi instrumen penilaian afektif yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman guru terhadap penilaian aspek afektif. Guru beranggapan bahwa penilaian afektif hanya sekedar melihat baik atau buruknya sikap dan perilaku peserta didik secara umum. Sehingga tidak perlu diukur dengan instrumen tertentu. Akan tetapi, penilaian afektif lebih dari pada itu.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (2015:7) bahwa penilaian afektif memiliki karakteristik berbeda dibandingkan ranah penilaian lainnya. Sehingga harus dinilai secara berkesinambungan dengan menggunakan teknik dan instrumen tertentu seperti teknik observasi (lembar observasi dan catatan jurnal), teknik penilaian diri (lembar penilaian diri) dan teknik penilaian antarteman (lembar penilaian antarteman).

Dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian diatas sebagai alat ukur, maka dalam hal ini guru dapat memperhatikan setiap indikator-indikator yang menunjukkan bahwa seorang peserta didik dapat dikatakan memiliki salah satu butir sikap tertentu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bloom (dalam Sunarti dan Selly Rahmawati, 2014 : 45) dalam menilai aspek afektif peserta didik, guru harus mengukur melalui indikator-indikator berdasarkan lima tingkatan Bloom yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan penilaian dalam ranah afektif yaitu : 1) kemampuan menerima, 2) kemampuan menanggapi, 3) kemampuan menilai, 4) kemampuan mengorganisasikan, dan 5) karakterisasi/pembentukan pola.

Terkait dengan hal itu, penilaian afektif yang dilakukan guru tidak hanya melihat baik buruknya sikap dan perilaku peserta didik secara umum. Namun harus diukur setiap butir sikap yang dikehendaki dalam IPK dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian afektif yang sesuai. Sehingga hasil penilaian afektif yang diberikan kepada masing-masing peserta didik dapat mencerminkan kemampuan yang diukur (prinsip sah) sebagaimana menjadi salah satu prinsip penilaian yang diuraikan dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015, pasal 4.

Hal ini disebabkan karena penilaian memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk mengetahui capaian kompetensi peserta didik serta menentukan tindak lanjut berupa keputusan (Latisma, 2011 : 2). Oleh karena itu, guru harus melaksanakan penilaian afektif sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian. Apabila penilaian afektif yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian maka tujuan pembelajaran PPKn tidak dapat tercapai. Sebab, hasil penilaian sikap yang diberikan kepada peserta didik tidak sah maka tindak lanjut yang dilakukan juga tidak tepat.

Sebagaimana yang diungkapkan Setiadi (2016 : 169) bahwa penilaian afektif merupakan domain yang banyak dikeluhkan Hal ini disebabkan karena, penilaian afektif memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ranah penilaian lainnya. Dari perbedaan karakteristik tersebut, Kunandar (2015 : 118) menyatakan kelemahan dari penilaian kompetensi afektif. Kelemahan penilaian afektif ini akan menjadi kendala bagi guru PPKn dalam melaksanakan penilaian afektif pada pembelajaran PPKn sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian. Adapun kelemahan penilaian afektif tersebut, diantaranya : a) terlalu banyak format yang melelahkan guru, b) membutuhkan alat penilaian yang tepat c) sulit dilakukan

pengamatan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak, dan d) memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama.

Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pariaman bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian afektif pada pembelajaran PPKn, sehingga pelaksanaan penilaian afektif belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian. Adapun kendala tersebut diantaranya yaitu *pertama*, guru kurang mampu mengembangkan instrumen penilaian afektif. Terdapat empat macam instrumen penilaian afektif yaitu lembar observasi dan catatan jurnal (apabila menggunakan teknik observasi), lembar penilaian diri (apabila menggunakan teknik penilaian diri), serta lembar penilaian antar teman (apabila menggunakan teknik penilaian antar teman). Dalam mengukur kompetensi afektif peserta didik guru juga harus mengembangkan instrumen tersebut dalam bentuk rubrik penilaian yang memuat indikator-indikator yang menunjukkan peserta didik memiliki kompetensi sikap tertentu agar jelas pengukuran atas penilaian yang dilakukan.

Dengan kata lain, terdapat beberapa format penilaian seperti lembar penilaian, rubrik penilaian dan format terkait lainnya yang harus dipersiapkan guru sebelum melakukan penilaian terhadap kompetensi afektif peserta didik. Instrumen penilaian yang banyak dan instrumen penilaian yang tepat dalam mengukur kompetensi afektif peserta didik ini menjadi kendala bagi guru PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman untuk melaksanakan penilaian afektif sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian. Karena, guru kurang memiliki kemampuan untuk membuat dan mengembangkan instrumen penilaian tersebut. Sehingga guru PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman tidak membuat dan mengisi lembar penilaian afektif. Kendala yang dihadapi guru PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman tersebut

sesuai dengan kelemahan dari penilaian afektif yang diuraikan oleh Kunandar (2015 : 118) pada point a dan b, yaitu a) terlalu banyak format yang melelahkan guru dan b) membutuhkan alat penilaian yang tepat.

Kedua, Jumlah siswa yang banyak dan waktu yang sedikit sehingga guru tidak mengisi instrumen/lembar penilaian afektif yang sesuai dengan ketentuan, dalam PBM. Terkait dengan instrumen/lembar penilaian diatas, bahwa guru tidak sempat mengisi/melakukan pengukuran selama PBM. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa terlalu banyak. Berdasarkan observasi peneliti, rata-rata jumlah siswa perkelas di SMA Negeri 1 Pariaman adalah 35 orang siswa. Itu artinya, sebanyak 35 orang siswa yang harus diamati sikap dan perilakunya oleh seorang guru PPKn, apabila terdapat sikap yang menonjol maka dicatat dalam lembar catatan jurnal. Namun apabila guru menggunakan instrumen lembar observasi maka guru mengisi dan mengukur kompetensi afektif setiap peserta didik. Sedangkan tugas guru dalam PBM tidak hanya sebatas melaksanakan penilaian afektif namun juga penilaian kognitif dan psikomotor serta melaksanakan skenario pembelajaran. Begitu pula halnya dengan alokasi waktu untuk mata pelajaran PPKn di tingkat menengah atas hanya 2 JP (90 menit). Dengan demikian, hal tersebut menjadi kendala bagi guru PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman untuk dapat mengisi lembar penilaian afektif selama PBM. Hal ini sesuai dengan kelemahan dari penilaian afektif menurut Kunandar (2015 : 118) pada point c dan d yaitu c) sulit dilakukan pengamatan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak, dan d) memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama.

Dari kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian afektif pada pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Pariaman, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, agar pelaksanaan penilaian afektif dapat sesuai

dengan ketentuan dan standar penilaian. Adapun upaya tersebut yaitu *pertama*, memberikan pembinaan secara langsung kepada guru. Pembinaan merupakan suatu proses perbuatan, usaha atau tindakan yang dilakukan secara berdayaguna. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung baik itu oleh Waka Kurikulum, Kepala Sekolah, maupun Pengawas Bidang Studi kepada guru PPKn untuk memberikan arahan kepada guru terkait dengan pelaksanaan penilaian afektif.

Kedua, mengadakan Lokakarya tentang Perangkat Pembelajaran di SMA Negeri 1 Pariaman. Lokakarya merupakan suatu pertemuan antara para ahli untuk membahas masalah praktis yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Demikian dapat diketahui bahwa, dalam kegiatan ini terdapat satu atau lebih narasumber yang berupaya untuk memberikan keterangan kepada peserta (pendidik dan tenaga kependidikan) mengenai pelaksanaan dari tugas-tugas keguruan termasuk pelaksanaan penilaian afektif.

Ketiga, mengadakan Workshop tentang Perangkat Pembelajaran di SMA Negeri 1 Pariaman. Workshop merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki keahlian dibidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta. Singkatnya, dalam workshop peserta menerima teori dan mempraktekkannya. Perbedaan antara lokakarya dengan workshop adalah pada kegiatan lokakarya tidak terdapat kegiatan untuk mempraktekkan informasi/teori yang dijelaskan oleh narasumber pada kegiatan workshop. Jadi pada kegiatan ini guru lebih memahami informasi-informasi yang diterimanya yaitu terkait dengan tugas-tugas keguruan termasuk pelaksanaan penilaian afektif.

Dari ketiga bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan penilaian afektif pada pembelajaran PPKn di SMA Negeri

1 Pariaman, dapat memperbaiki pelaksanaan penilaian afektif sehingga sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian apabila dilakukan secara terus menerus. Karena, profesionalitas seorang guru dalam melaksanakan penilaian afektif pada pembelajaran PPKn dapat terbentuk apabila dilakukan pelatihan secara terus menerus baik melalui pembinaan, kegiatan lokakarya maupun workshop. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suyanto (2013 : 21) bahwa untuk meningkatkan profesionalitas, dapat dilatih secara terus menerus melalui berbagai cara dan strategi sehingga menjadikan guru yang profesional dalam bidang pekerjaannya.

KESIMPULAN

Guru tidak merencanakan instrumen penilaian afektif dalam RPP, sehingga tidak melakukan pencatatan/penilaian kompetensi afektif peserta didik pada instrumen penilaian sesuai dengan ketentuan dalam PBM. Begitu pula halnya pada tahap pengolahan, tidak terdapat rekap nilai afektif selama 1 semester sebagai dasar pemberian nilai akhir afektif peserta didik berupa predikat maupun deskripsi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi guru diantaranya, guru kurang mampu mengembangkan instrumen penilaian afektif , jumlah siswa yang banyak dan waktu yang sedikit sehingga guru tidak mengisi instrumen/lembar penilaian afektif dalam PBM, dan sebagainya. Sehingga pihak sekolah berupaya untuk memberikan pembinaan, dan pelatihan melalui kegiatan lokakarya, serta workshop. Pelaksanaan penilaian afektif yang sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian akan turut menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran PPKn khususnya pada ranah afektif, begitu pula sebaliknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilaksanakan dengan baik karena bimbingan dari Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si dan Ibu Dr. Isnamir MA, M. Pd, kemudian kritik dan saran yang diberikan Ibu Dr. Fatmariza, M. Hum, Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd, dan Bapak Prof Azwar Ananda, MA sehingga artikel ini bisa dibuat sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press.
- Ayuriyanti, Siswi Dwi. 2015. “ Hambatan Guru dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran Kompetensi Keahlian Multimedia pada Penerapan Kurikulum 2013 di SMK Se Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Skripsi* : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2015. *Panduan Penilaian Untuk Sekolah Menengah Atas*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fadlillah. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Kunandar. 2015. *Penilaian Autentik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Latisma, DJ. 2011. *Evaluasi Pendidikan*. Padang : UNP Press.
- Marini. 2015. “ Implementasi Penilaian Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X di Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2015 Tentang *Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang
Standar Penilaian Pendidikan.

Setiadi, Hari. 2016. “ Pelaksanaan Penilaian
Pada Kurikulum 2013 “. *Jurnal Penelitian
dan Evaluasi Pendidikan.* (Vol. 20,
No. 2, Desember 2016). Hlm. 166—178.

Sunarti dan Selly Rahmawati. 2014. *Penilaian
dalam Kurikulum 2013.* Yogyakarta : CV
Andi Offset.

Suyanto. 2013. *Menjadi Guru Profesional.*
Jakarta : Rajawali Press.